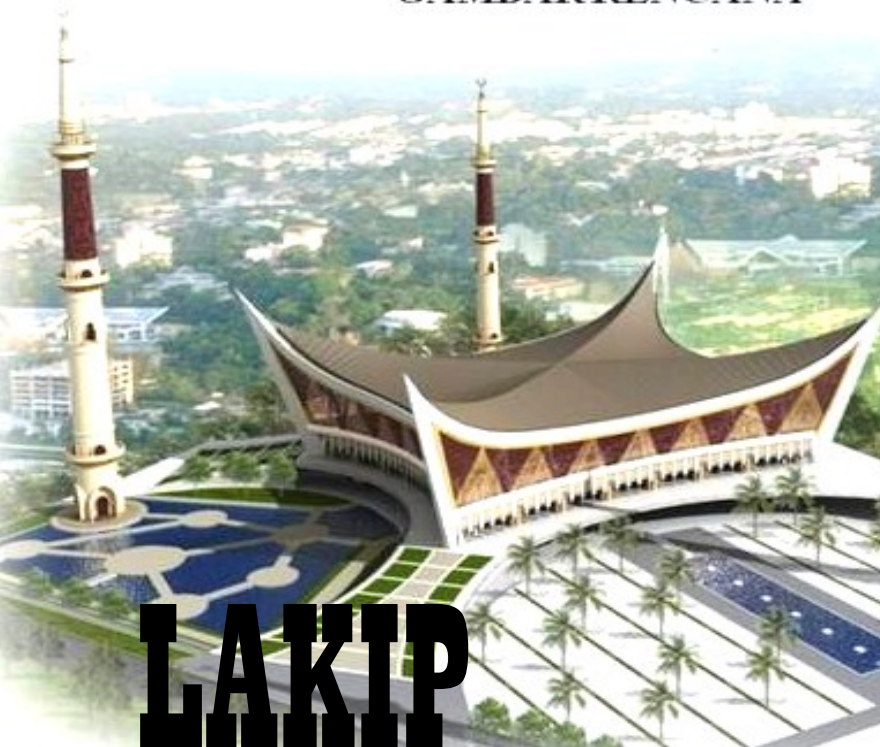




LAKIP

Laporan Kinerja Biro Organisasi

2018



Padang, 2019

Pengantar

Puji syukur kami ucapkan Kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, dan merupakan pelaksanaan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Perubahan Biro Organisasi 2016 - 2021.

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ini disusun dan disampaikan sebagai pelaksanaan kewajiban Biro Organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Biro Organisasi Tahun 2018, yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis atau target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Biro Organisasi Tahun 2018 dan merupakan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Walaupun demikian kami menyadari, kualitas laporan ini memang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan dan komitmen seluruh pegawai Biro dalam mengimplementasikan prinsip akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Faktor eksternal yang bersifat sebagai fungsi kontrol untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan bukan saja ditentukan oleh Biro Organisasi, namun juga ditentukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu Biro Organisasi selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan seperti, meningkatkan kompetensi / kualitas aparatur yang tersedia dan penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi.

Akhirnya, kepada semua pejabat dan seluruh staf pada Biro Organisasi yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal saleh dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya, Amin Ya Rabbil Alamin.

Padang, Januari 2019

Kepala Biro Organisasi,



IRWAN, S. Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680415 198902 1001

Ikhtisar Eksekutif

Sebagai bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sekaligus merupakan gambaran dari pelaksanaan dari sesuatu program /kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Memenuhi maksud tersebut diatas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan laporan kinerja Tahun 2018 yang merupakan penerapan tahun ketiga dari Renstra Biro Organisasi Tahun 2016-2021, dan Laporan Kinerja ini disusun untuk perwujudan kewajiban Biro Organisasi guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Biro dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan Biro Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2018 menunjukkan keberhasilan yang baik, artinya tugas pokok dan fungsi biro telah dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
2. Pencapaian 4 (empat) sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan capaian kinerja amat baik dan baik, dan telah sesuai dengan klafikasi penilaian yang ditetapkan. Pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) sasaran strategis menunjukkan rata-rata capaian indikator kinerja yang dapat dikatakan baik, dengan capaian rata-rata indikator sasaran strategis masing-masing, yaitu :
 - sasaran 1, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata capaian indikator kinerja **50%**,
 - sasaran 2, Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar **126,67 %**,
 - sasaran 3, Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja sebesar **100%**.

- sasaran 4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan 2 (dua) indicator kinerja yang rata-rata capaian kinerjanya sebesar **99,17 %**.
3. Informasi kinerja Biro Organisasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini, agar dijadikan bahan untuk perbaikan secara terus menerus dalam rangka penguatan akuntabilitas dan manajemen kinerja Biro untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 4. Masing-masing Bagian di lingkungan Biro Organisasi agar mengevaluasi indikator kinerja sasaran strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi untuk penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Hal
Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Gambaran Umum Biro Organisasi	1
1.2 Permasalahan Utama	11
Bab II Perencanaan Kinerja	15
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.2 Perjanjian Kinerja	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	21
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	22
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.4 Realisasi Anggaran	38
Bab IV Penutup	43
Lampiran :	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi	4
Tabel 1.2	Daftar Aset Biro Organisasi	4
Tabel 2.1	Ikhtisar Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2018	19
Tabel 2.2	Program Dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018	20
Tabel 3.1.1	Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	22
Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2018	22
Tabel 3.3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	24
Tabel 3.3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	26
Tabel 3.3.3	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	27
Tabel 3.3.4	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	29
Tabel 3.3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	31
Tabel 3.3.6	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti Kompetisi	31
Tabel 3.3.7	Daftar Nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Melaksanakan Surney kepuasan Masyarakat Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2018 Dibandingkan Tahun 2017	33
Tabel 3.3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat	34
Tabel 3.3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2018	37
Tabel 3.3.10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2017 dengan tahun 2018	37
Tabel 3.4.1	Realisasi Anggaran 2018	38

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1	42
Grafik 2	42

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Organisasi	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Biro Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018. Biro Organisasi berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum dan Kesra yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang organisasi.

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas pokok *“menyiapkan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tatalaksana, pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.* Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.
2. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.
4. Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian sekretariat daerah.

Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017, uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang analisis jabatan
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota
2. Bagian Pengembangan Kinerja
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang akuntabilitas kinerja
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi
 - c. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.
3. Bagian Ketatalaksanaan
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang prosedur tatakerja dan standarisasi
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan publik
 - c. Penyelenggaraan ketatausahaan Biro

1.1.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Organisasi terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas) Sub Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Biro Organisasi

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi
 - 2) Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Bagian Analisis Jabatan

b. Bagian Pengembangan Kinerja

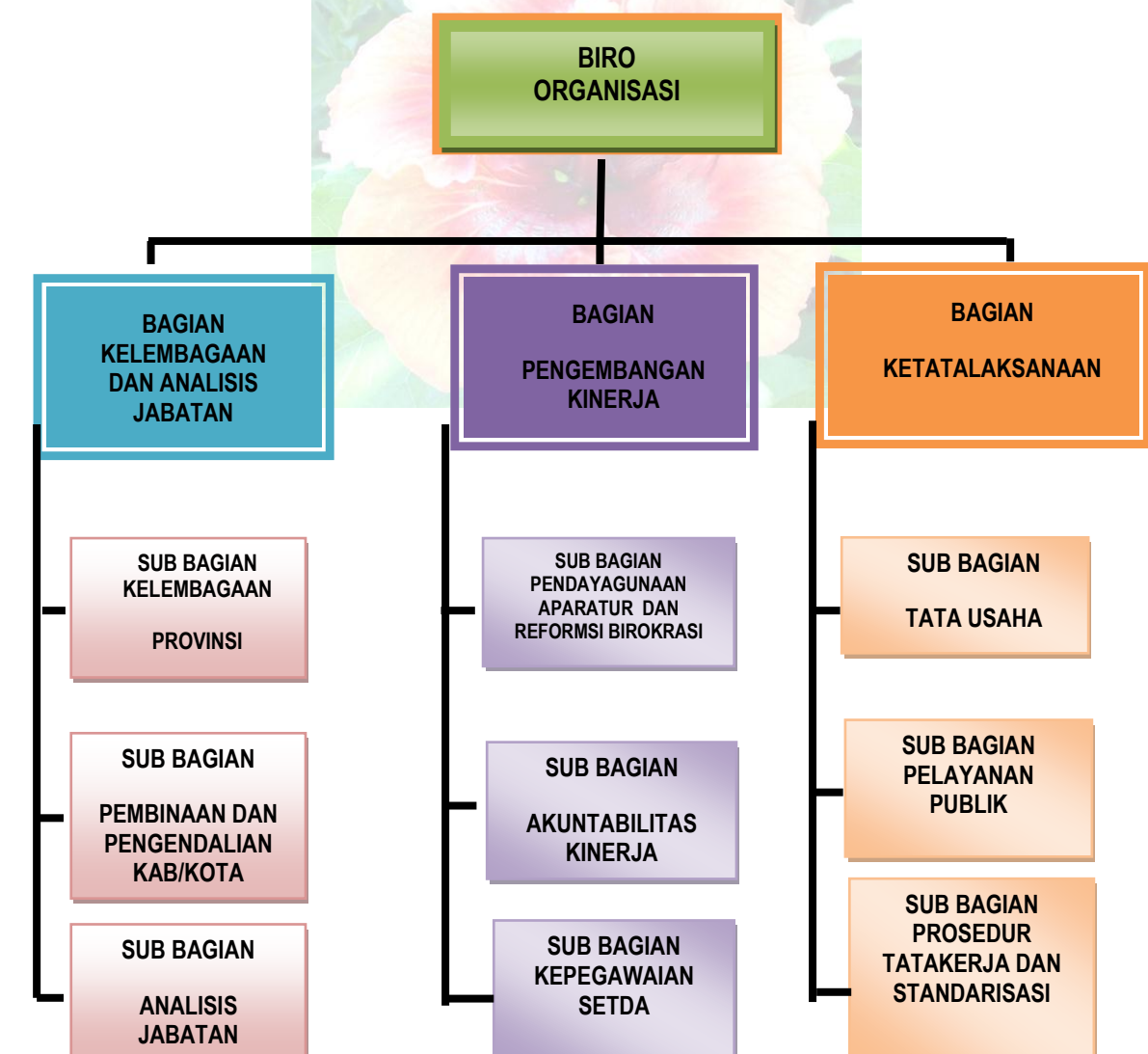
- 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
- 2) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
- 3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah

c. Bagian Ketatalaksanaan

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Sub Bagian Pelayanan Publik
- 3) Sub Bagian Prosedur dan Tata Kerja dan Standarisasi

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



1.1.3. Sumber Daya SKPD

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Biro Organisasi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 39 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	5	2					7
III	2	14		7			23
II			2	5			7
I							
PTT		1	1				2
Jumlah	7	17	3	12			39

2. Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi per 31 Desember 2018 sebagaimana tercatat pada tabel : 1.2

Tabel 1.2
Daftar Aset Biro Organisasi
Per 31 Desember 2018

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Merek / Type	Ukuran / Cc	Th. Pembelian	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan / Tahun (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kendaraan Roda 4	Innova	2000	2011	268.697.000,00	33.587.125,00	134.348.500,00	134.348.500,00
2	Kendaraan Roda 4	Kuda/Mini Bus	2000	2004	115.000.000,00	14.375.000,00	115.000.000,00	-

3	Sepeda Motor	HONDA	-	2014	14.226.200,00	1.778.275,00	1.778.275,00	12.447.925,00
4	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang	1990	65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
5	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang	2001	65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
6	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang	2001	65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
7	Mesin TIK	Royal	Besar	2008	3.941.600,00	788.320,00	3.941.600,00	0,00
8	Lemari Besi	Datascript	Besar	2006	474.000,00	94.800,00	474.000,00	0,00
9	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	1997	5.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00
10	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	2007	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
	Filling Kabinet	Datascrip	Sedang	2015	37.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	29.600.000,00
11	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	2007	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
12	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	2007	5.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00
13	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
14	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
15	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
16	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	5.660.800,00	1.132.160,00	3.396.480,00	2.264.320,00
17	Brangkas	Lion	-	2005	3.981.000,00	796.200,00	3.981.000,00	0,00
18	Sketsel	-	Besar	2014	9.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
19	Lemari Kaca Dorong	-	Besar	2002	76.000,00	15.200,00	76.000,00	0,00
20	Lemari Kaca Dorong	-	Besar	2002	152.000,00	30.400,00	152.000,00	0,00
21	White Board	-	Besar	2000	12.000,00	2.400,00	12.000,00	0,00
22	LCD Projektor	Infokus/Layar	Besar	2006	15.096.000,00	3.019.200,00	15.096.000,00	0,00
23	Projektor (Infokus)	Sony	Besar	2014	19.825.000,00	3.965.000,00	3.965.000,00	15.860.000,00
24	Lemari kayu/Kaca	-	Sedang	2002	325.000,00	65.000,00	325.000,00	0,00
25	Lemari Kayu	-	Kecil	2006	355.000,00	71.000,00	355.000,00	0,00
26	Meja Kayu	-	-	2000	462.000,00	92.400,00	462.000,00	0,00
27	Meja kayu	1/2Biro	-	2000	811.333,33	162.266,67	811.333,33	0,00
28	Meja kayu	1/2Biro	-	2000	1.622.666,67	324.533,33	1.622.666,67	0,00
29	Kursi Besi	Futura	-	1995	412.000,00	82.400,00	412.000,00	0,00

30	Kursi Besi	Futura	Sedang	1995	807.636,36	161.527,27	807.636,36	0,00
31	Kursi Besi	Futura	Sedang	1995	1.009.545,45	201.909,09	1.009.545,45	0,00
32	Kursi kerja	-	-	2001	69.000,00	13.800,00	69.000,00	0,00
33	Kursi Besi	Futura	-	2002	655.000,00	131.000,00	655.000,00	0,00
34	Meja Telepon	-	Kecil	2006	148.000,00	29.600,00	148.000,00	0,00
35	Meja Rpat Panjang	-	Besar	2000	2.280.000,00	456.000,00	2.280.000,00	0,00
36	Kursi Rapat	-	-	2001	4.620.000,00	924.000,00	4.620.000,00	0,00
37	Kursi Rapat	-	-	2007	2.310.000,00	462.000,00	2.310.000,00	0,00
38	Kursi Rapat	Eda	-	2007	2.310.000,00	462.000,00	2.310.000,00	0,00
39	Kursi Tamu	Jati	Sedan g	2006	6.375.000,00	1.275.000,00	6.375.000,00	0,00
40	Kursi Tamu	Manaco Ovel 3211	Besar	2008	14.900.000,00	2.980.000,00	14.900.000,00	0,00
41	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	1990	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
42	Kursi Putar Eselon III	Yubi	Besar	2006	2.208.800,00	441.760,00	2.208.800,00	0,00
43	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	1.012.500,00	202.500,00	1.012.500,00	0,00
44	Kursi Puter Eselon III	Yubi	Besar	2006	4.417.600,00	883.520,00	4.417.600,00	0,00
45	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
46	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
47	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
48	Kursi Warna Ping Putar	-	Sedan g	2006	4.134.000,00	826.800,00	4.134.000,00	0,00
49	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
50	Kursi Putar Eselon III	Yubi	Besar	2006	4.417.600,00	883.520,00	4.417.600,00	0,00
51	Kursi Putar Rapat	Eda	Sedan g	2006	6.888.000,00	1.377.600,00	6.888.000,00	0,00
52	Kursi Putar Eselon III	Ergonic	900	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
53	Kursi Putar Eselon III	Ergonic	900	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
54	Meja Komputer	-	Sedan q	2006	312.000,00	62.400,00	312.000,00	0,00
55	Meja Kerja	-	1/2 biro	2005	213.818,18	42.763,64	213.818,18	0,00
56	Meja Kerja	-	1/2 biro	2005	249.454,55	49.890,91	249.454,55	0,00
57	Meja Kerja	-	1/2 biro	2005	320.727,27	64.145,45	320.727,27	0,00

58	Menja Kerja	1/2 Biro	Sedang	2007	2.013.000,00	402.600,00	2.013.000,00	0,00
59	Menja Kerja	1/2 Biro	Sedang	2007	6.039.000,00	1.207.800,00	6.039.000,00	0,00
60	Kulkas	Panasonic	Besar	2008	3.084.800,00	616.960,00	3.084.800,00	0,00
61	Air Conditining	Panasonic/LG	1 1/2 Pk	2006	5.320.000,00	1.064.000,00	5.320.000,00	0,00
62	Air Concditioning	Panasonic	1 1/2 Pk	2007	16.575.000,00	3.315.000,00	16.575.000,00	0,00
63	Ups 500 watt	-	-	2006	780.000,00	156.000,00	780.000,00	0,00
64	UPS	Enlight	Kecil	2010	635.050,00	127.010,00	635.050,00	0,00
65	Kamera Digital	Sony	Kecil	2009	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
66	Kamera	Canon	Besar	2014	12.845.050,00	2.569.010,00	2.569.010,00	10.276.040,00
67	Jam Dinding	-	Kecil	2006	63.000,00	12.600,00	63.000,00	0,00
68	Wiraless Toa	Toa	Sedang	2015	6.690.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	5.352.000,00
69	Komputer Mainframe	Rainer SM	Eoon	2012	29.507.750,00	7.376.937,50	22.130.812,50	7.376.937,50
70	Komputer (PC)	ACER	Pintium 4	2007	6.715.000,00	1.678.750,00	6.715.000,00	0,00
71	Komputer)PC)	Acer	Pintium 4	2007	6.900.000,00	1.725.000,00	6.900.000,00	0,00
72	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
73	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
74	Komputer/PC	HP PAVILION	BESAR	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
75	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
76	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
77	Komputer PC	HP	-	2014	17.532.996,00	4.383.249,00	4.383.249,00	13.149.747,00
78	Komputer PC	LENOVO	Sedang	2015	27.600.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	20.700.000,00
79	Lap Top	Sony Vaio	Kecil	2007	24.725.000,00	6.181.250,00	24.725.000,00	0,00
80	Lap Top	Fujitsu	Sedang	2007	23.875.000,00	5.968.750,00	23.875.000,00	0,00
81	Note Book (Lap Top)	Acer	Pintium 4	2008	16.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00
79	Note Book (Lap Top)	Sony Vaio VGN TT-	Kecil	2009	23.800.000,00	5.950.000,00	23.800.000,00	0,00
80	Note Book (Lap Top)	Acer (Procesor	Besar	2009	7.900.000,00	1.975.000,00	7.900.000,00	0,00
81	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2010	11.000.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	0,00
82	Note Book (Lap Top)	Axio MLM 2422 12	Besar	2010	8.900.000,00	2.225.000,00	8.900.000,00	0,00

83	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2010	11.000.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	0,00
84	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2011	9.750.000,00	2.437.500,00	9.750.000,00	0,00
85	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2011	19.500.000,00	4.875.000,00	19.500.000,00	0,00
86	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2011	19.500.000,00	4.875.000,00	19.500.000,00	0,00
87	Note Book	Toshiba	Besar	2012	10.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00
88	Note Book	ASUS	-	2014	12.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	9.375.000,00
89	Keyboard	-	-	2005	78.000,00	19.500,00	78.000,00	0,00
90	Keyboard	-	Sedang	2010	300.000,00	75.000,00	300.000,00	0,00
91	CPU	Back Bone 52 x max	-	2006	780.000,00	195.000,00	780.000,00	0,00
92	DVD RW	Lq	Kecil	2010	450.000,00	112.500,00	450.000,00	0,00
93	Printer Laser Jet 1020	HP Laser Jet 1020	HP 1020	2006	3.563.000,00	890.750,00	3.563.000,00	0,00
94	Printer	HP Laser Jet 1020	Sedang	2007	1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
95	Printer	HP Laser Jet 1020	-	2007	1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
96	Printer	HP Laser Jet 1020	Sedang	2007	1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
97	Printer	Epson	Kecil	2013	2.397.250,00	599.312,50	1.198.625,00	1.198.625,00
98	Printer	Epson	Kecil	2013	2.397.250,00	599.312,50	1.198.625,00	1.198.625,00
99	Printer	Epson	Kecil	2013	2.397.250,00	599.312,50	1.198.625,00	1.198.625,00
100	Printer	Epson	Kecil	2013	2.397.250,00	599.312,50	1.198.625,00	1.198.625,00
101	Printer	HP	-	2014	950.000,00	237.500,00	237.500,00	712.500,00
102	Scanner	HP Laser Jet G 4050	G 4050	2008	4.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00
103	Komputer	Advandace	-	2001	3.743.000,00	935.750,00	3.743.000,00	0,00
104	Komputer	SAMSUNG	Pentium 4	2005	14.178.714,29	3.544.678,57	14.178.714,29	0,00
105	Komputer	SAMSUNG	Pentium 4	2005	28.357.428,57	7.089.357,14	28.357.428,57	0,00
106	Komputer	Acer	Pintium 4	2008	6.900.000,00	1.725.000,00	6.900.000,00	0,00
107	Komputer	ACS11	Pintium 4	2008	11.465.000,00	2.866.250,00	11.465.000,00	0,00
108	Komputer	Acer	Pintium 4	2009	11.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00
109	Komputer	Acer	Pintium 4	2009	10.500.000,00	2.625.000,00	10.500.000,00	0,00
110	Komputer	Acer Aspir M5641	Pintium 4	2009	11.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00

111	Komputer	Acer	Pintium 4	2009	11.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00
112	Komputer	Asus	Besar	2013	9.995.975,00	2.498.993,75	4.997.987,50	4.997.987,50
113	Komputer/PC	Asus	Sedang	2013	9.995.975,00	2.498.993,75	4.997.987,50	4.997.987,50
114	Monitor LCD	Samsung Sync	Besar	2009	2.950.000,00	737.500,00	2.950.000,00	0,00
115	Monotor LCD	Samsung Sync	Besar	2010	3.094.160,00	773.540,00	3.094.160,00	0,00
116	Printer	HP Laser Jet	1020	2008	750.000,00	187.500,00	750.000,00	0,00
117	Printer	CANON PIXMA	Besar	2009	2.400.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00
118	Printer	HP LASER JET P1005	Besar	2009	2.500.000,00	625.000,00	2.500.000,00	0,00
119	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar	2011	1.650.000,00	412.500,00	1.650.000,00	0,00
120	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar	2011	1.650.000,00	412.500,00	1.650.000,00	0,00
121	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar	2011	3.300.000,00	825.000,00	3.300.000,00	0,00
	Printer	HP	Sedang	2015	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000.
122	Printer HP Laser Jet	HP Laser Jet	Besar	2014	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	825.000,00
123	Plasdisk (Hardis	External	Kecil	2009	675.000,00	168.750,00	675.000,00	0,00
124	Plasdisk (Hardis	External	Kecil	2009	1.350.000,00	337.500,00	1.350.000,00	0,00
125	Harddisk Egate giga	Egate 320 giga	Kecil	2010	500.000,00	125.000,00	500.000,00	0,00
126	Moss	Genius	-	2000	62.000,00	15.500,00	62.000,00	0,00
127	Moss	Mikrowef	-	2001	104.000,00	26.000,00	104.000,00	0,00
128	Moss Komputer	-	-	2006	62.000,00	15.500,00	62.000,00	0,00
129	Sever Single CPU	IBM	Pintium 4	2007	20.880.000,00	5.220.000,00	20.880.000,00	0,00
130	Meja Kayu	-	-	2004	462.000,00	92.400,00	462.000,00	0,00
131	Kursi Kerja Eselon II	Ergonic 708	Besar	2008	2.800.000,00	560.000,00	2.800.000,00	0,00
132	Meja Kerja	-	-	2000	35.666,99	7.133,40	35.666,99	0,00
133	Meja Kerja	-	-	2005	71.333,33	14.266,67	71.333,33	0,00
134	Kursi Kerja Eselon III	Ergonic 900	Besar	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
135	Kursi Kerja Eselon III	Ergonic 900 Hidrolik	Besar	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
136	Kursi Kerja Eselon II	-	-	2014	2.700.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00
137	Kursi Kerja Eselon III	-	-	2014	2.300.000,00	460.000,00	460.000,00	1.840.000,00

138	TV LCD 32 inci	Panasonic	32 inci	2012	10.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
139	Pesawat Telepon	Sahitel/Panasonik	Sedang/K Ec	2001	1.425.000,00	285.000,00	1.425.000,00	0,00
140	Pesawat Telepon	Sahitel/Panasonik	Sedang/K Ec	2001	1.425.000,00	285.000,00	1.425.000,00	0,00
141	Lemari Arsip Besi	Prospek/KB 8D06	Sedang	2016	17.400.000,00	870.000,00	6.960.000,-	10.440.000,00
142	Lemari Arsip Besi	Prospek/KB 8D26	Sedang	2016	4.000.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
143	Komputer/PC	Lenovo	Inrel Core i3-5005U	2016	18.400.000,00	4.600.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
144	Komputer/PC	HP 20-CU39D	Intel Core i3-6100U	2016	18.200.000,00	4.550.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
145	Notebook/Lap Top	Asus X456UQ-FA029D	Intel Corei—7 6500U	2016	26.000.000,00	6.500.000,-	13.000.000,00	13.000.000,00
146	Printer	Canon	IP2770	2016	2.000.000,00	500.000,-	1.000.000,00	1.000.000,00
147	Printer	Epson	M.200	2016	5.500.00,00	1.375.000,00	2.750.000,-	2.750.000,00
148	Meja Rapat	½ Biro	120x 60 cm	2017	9.365.994,00	1.873.198.80	1.873.198.80	7.492.795.20
149	Kursi Rapat	Futura	Sedang	2017	5.250.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.200.000,00
150	Kursi Rapat	Chairman	Sedang	2017	2.400.000,00	480.000,00	480.000,00	1.920.000,00
151	AC	Sharp	2 PK	2017	9.600.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	7.680.000,00
152	AC	Sharp	2 PK	2017	19.200.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	15.360.000,00
153	Komputer/ PC	All In HP 20-C303D	7200 U	2017	24.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00
154	Lemari	Prospek	KBBD 06	2017	6.600.000,00	1.320.000.,00	1.320.000.,00	5.280.000,00
155	Lemari	Prospek	5 Tingkat	2017	13.200.000,00	2.640..000,00	2.640..000,00	10.560.000,00
156	Kursi Rapat	Futura	416	2018	20.790.000	-	-	-
157	Kursi Kerja Pimpinan	Italiano	S-094A	2018	9.460.000	1.892.000	1.892.000	7.568.000
158	Kursi Kerja Pimpinan	DF	DF-8	2018	7.370.000	1.474.000	1.474.000	5.896.000
159	Kursi Kerja Pimpinan	DF	DF-8	2018	14.740.000	2.948.000	2.948.000	11.792.000
160	Meja Kerja Pejabat	Grand carlito	CA2021ES	2018	13.500.000	2.700.000	2.700.000	10.800.000
160	Meja Kerja Pejabat	Enzo	VT-168	2018	12.000.000	2.400.000	2.400.000	9.600.000
161	Meja Kerja Pejabat	Enzo	VT-168	2018	24.000.000	4.800.000	4.800.000	19.200.000
162	Komputer PC	Asus	V22	2018	10.500.000	2.725.000	2.725.000	8.175.000
163	Komputer PC	Asus	V22	2018	10.500.000	2.725.000	2.725.000	8.175.000
164	Komputer PC	Asus	V22	2018	21.800.000	5.450.000	5.450.000	16.350.000

165	Printer	EPSON	M200	2018	11.000.000	2.750.000	2.750.000	8.250.000
166	Infocus	Infocus In 114xv	IN114XV	2018	14.450.000	2.890.000	2.890.000	11.560.000
167	Layar Projector Otomatis	Wall screen Focus	120X 120	2018	9.800.000	1.960.000	1.960.000	7.840.000
168	Kendaraan Dinas Operasional	Toyota	Kijang Inova 2.0 GM/A LUX VIN	2018	303.750.000	37.968.750	37.968.750	265.781.250
169	Air Conditioner	Panasonic	CS-YN 18TKP-R32	2018	39.600.000	7.920.000	7.920.000	31.680.000
170	Scanner	EPSON	DS-570W	2018	12.750.000	3.187.500	3.187.500	9.562.000
171	Penghancur Kertas	Promaxi	S290	2018	4.500.000	900.000	900.000	3.600.000
172	Lemari Arsip/Dokumen	Lemari Dokumen	2x2.30 Meter	2018	7.700.000	1.540.000	1.540.000	6.160.000

1.2 Permasalahan Utama

Permasalahan utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2016 Biro Organisasi melaksanakan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan permasalahan terjadi adalah kurang optimalnya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Disamping itu permasalahan lainnya adalah :

- a. Masih adanya OPD yang mengusulkan untuk meningkatkan atau menaikkan type dan juga adanya OPD yang mengusulkan pemindahan urusannya ke OPD lain yang mengakibatkan turunya type OPD.
- b. Kurangnya pemahaman aparaturnya dalam penyusunan evaluasi jabatan dan analisa beban kerja
- c. Masih adanya peraturan pedoman nomenklatur yang belum diterbitkan oleh pemerintah pusat, sehingga sebagian perangkat daerah dalam menyusun nomenklatur jabatan dan tugas pokok dan fungsi belum mengacu kepada aturan yang baku.

2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

a. *Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik*

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat adalah masih belum optimalnya sosialisasi tentang tata cara pengelolaan pengaduan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penggunaan Aplikasi Lapor SP4N oleh masyarakat guna penyampaian keluhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dikarenakan keterbatasan anggaran, dan permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan pengaduan yang masuk yang telah disampaikan oleh admin LAPOR-SP4N kepada pejabat penghubung yang berada pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

b. *Kompetisi Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik*

Permasalahan dalam melaksanakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik adalah waktu untuk pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai, hal ini diakibatkan banyaknya Unit Kerja Pelayanan Publik baik yang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Unit Kerja Pelayanan Publik Kabupaten / Kota, dan untuk tahun 2018 seluruh Tim Penilai berada pada 1 (satu) Tim, namun untuk pelaksanaan penilaian anggota Tim dibagi dan untuk menentukan 5 (lima) besar dilaksanakan kembali penilaian, sehingga hasilnya penilaian akan lebih maksimal dan menghasilkan pemenang yang betul telah siap dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengembangan pelayanan publik. Permasalahan lainnya adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik baik Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten / Kota masih belum sempurna dan masih adanya inovasi yang ditampilkan belum menyentuh kepada masyarakat secara utuh terhadap pelayanan yang diterima masyarakat.

c. *Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)*

Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan survey kepuasan masyarakat yang bertujuan agar adanya persamaan persepsi dan pemahaman bagi aparatur pelaksana pelayanan publik pada OPD tentang pentingnya survey kepuasan masyarakat dalam mengetahui kekurangan pelayanan dan mencari masukan dari masyarakat untuk pengembangan pelayanan publik. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Belum seluruhnya OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggarkan biaya untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat
- Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat belum diselenggarakan secara berkala sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

d. Perbaikan Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya kembali dilakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penyiapan dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten, disamping itu masih rendahnya komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Belum meratanya pemahaman pimpinan, pejabat struktural dan seluruh aparatur sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerja masing-masing perangkat daerahnya.
- b. Masih perlunya keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.

4. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Peran birokrasi pemerintah dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sangat strategis, maka untuk itu perlu dilakukan perubahan atau penataan birokrasi melalui suatu program, yaitu Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan keprofesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum sesuai sebagaimana yang diharapkan, persoalan yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi tersebut dikarenakan belum semuanya Organisasi Perangkat Daerah memahami tentang penerapan rencana aksinya. Kendala lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Konsistensi kebijakan yang terkait dengan aspek reformasi birokrasi masih kurang.
- b. Evaluasi reformasi birokrasi dan indikatornya belum dipahami dengan baik sehingga target nilai reformasi birokrasi sulit untuk ditetapkan.
- c. Belum adanya laporan pelaksana reformasi birokrasi dari OPD yang menyangkut kepada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.
- d. Belum semuanya OPD membentuk tim reformasi birokrasi.
- e. Belum adanya evaluasi terhadap program aksi reformasi birokrasi pada OPD Provinsi Sumatera Barat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan disamping itu Renstra OPD juga dapat menjelaskan atau menjawab untuk apa suatu OPD dibentuk. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, Renstra OPD juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 dan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2018 Biro Organisasi, dan sesuai kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mempergunakan e-SAKIP.

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 *Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan kondisi yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021, yang merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah daerah dengan DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu

pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Gubernur Sumatera Barat yang pada dasarnya merupakan upaya umum yang akan diselenggarakan dan menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (Lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah dan berdasarkan pengertian Misi tersebut, maka Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah“ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya, dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi

Misi ini diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah:

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan menata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih

produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

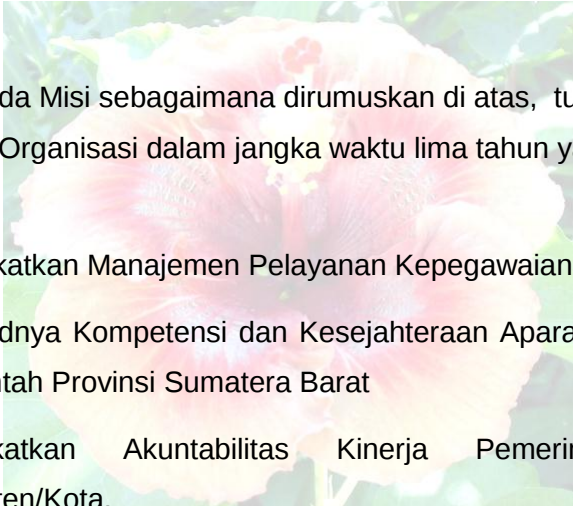
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kepada Misi 2 yaitu **“Meningkatkan Pemerintahan yang Baik dan Profesional”** dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Biro Organisasi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah:

- 
- a) Meningkatkan Manajemen Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah.
 - b) Terwujudnya Kompetensi dan Kesejahteraan Aparatur Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - c) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - d) Meningkatkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
 - e) Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - f) Meningkatkan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - g) Meningkatnya Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
 - h) Terlaksananya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan.
 - i) Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik.
 - j) Terlaksananya Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat.

2. Sasaran

Dari Visi, Misi dan Tujuan Biro Organisasi yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

a. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan merupakan hal yang strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan masyarakat agar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan akan terwujud apabila berfungsinya sistem AKIP secara baik. Dan apabila Sistem AKIP telah berfungsi secara baik dan benar maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan menjadi kenyataan.

b. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dibentuk dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan sangat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugasnya.

c. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk dari pengembangan suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang baik kepada setiap warga negara atau penduduk dalam suatu bentuk pelayanan.

d. Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi yang Baik

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan suatu tata kelola organisasi yang efektif dan efisien yang memuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dengan telah diwujudkan sasaran, maka telah ditetapkan pula sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra Biro Organisasi tahun 2016 – 2021, maka Perjanjian/Penetapan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2018 berdasarkan Perubahan Renstra 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Ikhtisar Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2018
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A	2
2	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan Kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	60
3	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 4.2 Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program - Realisasi Fisik (%) - Realisasi Keuangan (%)	BB 100 95

Untuk menerapkan atau melaksanakan sasaran strategis dengan indikator kinerjanya, pada tahun 2018, kegiatan – kegiatan penunjang ditetapkan dalam beberapa Program, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Program Dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 696,063,909
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 747,393,249
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp. 59,759,699
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 204,033,050
V	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp. 521,052,825
VI	MANAJEMEN PERUBAHAN	Rp. 184,500,800

VII	PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR	Rp. 336,957,418
VIII	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Rp. 384,879,728
IX	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Rp. 1,446,340,048
X	PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 432,417,447
	<i>Jumlah</i>	Rp. 5,013,398,173



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Proses penyusunan pelaporan kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan, pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, dimana pelaporan kinerja ini akan menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai suatu pijakan dapat diwujudkan.

Untuk mendukung pembuatan laporan kinerja setiap instansi berkewajiban menyiapkan. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik, dan memenuhi maksud tersebut, untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dilakukan pengukuran capaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2018, dan hasil pengukuran capaian target kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.1
Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 % - $\geq$ 100 %	Amat Baik
2	69 % - 84 %	Baik
3	53 % - 68 %	Cukup
4	Kecil dari 53 %	Gagal

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Penetapan Kinerja Biro Organisasi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	2	1	50
2.	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	60	76	126,67
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10	10	100
4.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 4.2 Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan - Realisasi Fisik (%) - Realisasi Keuangan (%)	BB	BB	100

				100	100	100
				95	92.63	97,51
Jumlah Capaian						547,51
Rata - rata capaian indikator kinerja						91,25

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja 4 (Empat) sasaran strategis telah dapat direalisasi dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 6 (enam) indikator kinerja sebesar 91,25 %.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis.



SASARAN STRATEGIS 1 **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan** **Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan kewenangannya semakin kuat, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya terkait kepada aspek efisiensi dan efektivitas namun juga berkaitan dengan aspek-aspek lainnya antara lain konsep akuntabilitas dimana bertujuan agar pemerintah dan pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan. Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada pemerintahan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran strategis pemerintah daerah secara efektif dan efisien, professional, akuntabel, transparansi dan responsive, untuk itu penerapan prinsip akuntabilitas merupakan salah satu persyaratan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Penerapan SAKIP diharapkan mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perjanjian kinerja sampai dengan evaluasi kinerja, oleh karena itu penerapan SAKIP tidak hanya mendorong kesesuaian akuntabilitas kinerja tetapi sekaligus meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban (Akuntabilitas). Di Indonesia pemerintah telah menetapkan dan melaksanakan serta memperbaiki akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mewajibkan

seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi pemerintah provinsi dan satuan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan merupakan hal yang strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan masyarakat agar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan akan terwujud apabila berfungsinya sistem AKIP secara baik, dan apabila e-SAKIP telah berfungsi secara baik dan benar maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan menjadi kenyataan, hal ini merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Untuk capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 tercantum pada tabel 3.3.1.

Tabel 3.3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A	2	1	50

Dari tabel 3.3.1 dapat dilihat, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 50%. Realisasi indikator kinerja diukur berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi dengan komponen yang dievaluasi berdasarkan bobot nilai untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	35
2	Pengukuran Kinerja	20
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja	10
5	Capaian Kinerja	20
Total Nilai		100

Dari tabel di atas dapat dilihat, indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A, ditargetkan 2 terealisasi 1 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 50%, hal ini disebabkan karena masih perlunya peningkatan pembinaan/bimbingan penerapan SAKIP pada OPD dan untuk tahun 2018 dari hasil evaluasi laporan kinerja OPD yang mendapat nilai A hanya 1 (satu) OPD.

Untuk evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB di tahun 2017 yang hasilnya diumumkan pada tahun 2018 kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penilaian BB

Dalam melaksanakan sasaran strategis 1, program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan untuk menunjang pencapaian target indikator kinerja sasaran jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan sebesar Rp. 521.052.825,- terealisasi sebesar Rp. 490.648.300,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,16%.



SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang
sesuai aturan Perundang-undangan Kelembagaan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan kepada beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing – masing daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pengelompokan jenis perangkat daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative.
2. Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta mendukung pelaksanaan dan fungsi tugas DPRD dan secara administrative dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Inspektorat, bertugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Dinas Daerah, merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah.
5. Badan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Besaran organisasi perangkat daerah yang diperbolehkan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi haruslah berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan 2 (dua) variabel yaitu :

1. variable umum, variable yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Kabupaten/Kota anggaran daerah.
2. Variabel teknis, variabel yang ditetapkan berdasarkan beban tugas utama setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dijelaskan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berperan membina dan mengendalikan besaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan melaksanakan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah tentang organisasi perangkat daerah, dan sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Organisasi menetapkan sasaran strategis kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.2.

Tabel 3.3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	60	76	126,67

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat, capaian kinerja indikator sasaran strategis 2 Meningkatnya Penataan Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran target 60% dan terealisasi 76% dengan capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 126,67%.

Formula yang digunakan untuk pengukuran indikator kinerja persentase Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{OPD yg tepat fungsi dan ukuran}}{\sum \text{Jumlah OPD}} \times 100 =$$

Berdasarkan data dan formula tersebut diatas, hasil pengukuran realisasi indikator kinerja persentase kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum 38 \text{ OPD}}{\sum 50 \text{ OPD}} \times 100 = 76$$

Dari pelaksanaan indikator kinerja sasaran strategis 2 telah dilaksanakan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan besaran organisasi yang telah dilaksanakan penataannya serta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada table 3.3.3

Tabel 3.3.3
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
A	BIRO SETDA
1	BIRO PEMERINTAHAN
2	BIRO HUKUM
3	BIRO HUMAS
4	BIRO KERJASAMA RANTAU
5	BIRO PEREKONOMIAN
6	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7	BIRO UMUM
8	BIRO ADM. PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
9	BIRO ORGANISASI
B	SEKRETARIAT DPRD
C	INSPEKTORAT DAERAH
D	DINAS-DINAS
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KESEHATAN

3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	DINAS SOSIAL
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	DINAS PANGAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
13	DINAS KEPENDUDUKAN, PENDATANGAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14	DINAS PERHUBUNGAN
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
19	DINAS KEBUDAYAAN
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
22	DINAS PARIWISATA
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
24	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
25	DINAS KEHUTANAN
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	BADAN
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	BADAN KEUANGAN DAERAH
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	BADAN PENGHUBUNG PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN DAERAH PEMERINTAH
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis 2 dengan Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.4

Tabel 3.3.4
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Tahun 2016 - 2017

No	Indikator Kinerja	2017			2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	55	76,09	138,35%	60	76	126,67

Dari tabel 3.3.4 dilihat, bahwa perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja, persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2017 dapat dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini disebabkan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih berpedoman kepada aturan variable umum dan variable teknis untuk pemetaannya dalam menentukan ukuran besar organisasi, dan pembentukan Organisasi Perangkat daerah yang telah dilaksanakan menunjukkan terlaksananya azas pembagian tugas dan tata kerja yang jelas, sehingga kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran dapat diwujudkan mengingat besaran beban tugas masing Organisasi Perangkat Daerah akan berbeda berdasarkan kepada typologi organisasi.

Untuk penataan UPTD sampai akhir tahun 2018, Biro Organisasi telah melaksanakan penataan unit pelaksana teknis daerah yang berjumlah sebanyak 81 (delapan puluh satu) kelembagaan, dibandingkan dengan jumlah UPTD sebelum penataan berjumlah sebanyak 75 (Tujuh puluh lima) kelembagaan UPTD, sehingga adanya penambahan jumlah kelembagaan UPTD sebanyak 6 (enam) UPTD atau dengan persentase kenaikan kebutuhan kelembagaan sebesar 7,4%, hal ini sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Tahun 2018 anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang terlaksananya sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan Perundang-Undangan Kelembagaan anggaran tersedia pada 1 (satu) program yaitu program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebanyak 7 (Tujuh) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.446.340.048,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.390.655.303,- atau dengan persentase sebesar 96,15 %.



SASARAN STRATEGIS 3 **Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik**

Kemunculan sektor pelayanan publik berhubungan erat dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pelayanan, karena merupakan titik strategis dalam membangun dan menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Keberhasilan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam ranah pelayanan publik akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang akan dapat meningkatkan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidak siapan dalam menanggapi berbagai masalah dalam pembangunan. Konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku diharapkan akan dapat dan mampu membawa perubahan dalam konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri dari terselenggaranya pemerintahan yang baik, dan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah harus seiring dan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Artinya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri.

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun yang langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas

pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut perlu adanya pembinaan dan pengembangan dari penyelenggaraan pelayanan public berupa inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu langkah dalam menciptakan pelayanan yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas pada Unit Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UKP3) Provinsi Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas pelayanan publik sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam Perubahan Renstra Biro Organisasi tahun 2016 – 2021 dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.5

Tabel 3.3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10	10	100%
		Capaian Rata – Rata		100%

Dari tabel 3.3.5 dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 3, yaitu jumlah inovasi pelayanan publik yang diciptakan sebanyak 10 (sepuluh) inovasi dengan persentase capaian sebesar 100%. Perhitungan dari jumlah inovasi yang diciptakan oleh unit kerja penyelenggara pelayanan publik dapat diketahui dari jumlah Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat, sehingga dari inovasi yang ditampilkan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan nantinya dapat mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Untuk lebih jelasnya nama Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3.6

Tabel 3.3.6
Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) Yang Mengikuti Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UKP3
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pustaka Daerah

2	Dinas Sosial	UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Rumah Sakit Daerah Achmad Moecthar Bukittinggi	RS. Achmad Moecthar Bukittinggi
5	Dinas Pangan	UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
6	Badan Penghubung Sumatera Barat	TMII
7	Rumah Sakit Daerah Muhammad Natsir Solok	Rumah Sakit Daerah Muhammad Natsir Solok
8	Badan Keuangan Daerah	UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Bukittinggi
9	Badan Keuangan Daerah	UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang Panjang
10	Dinas Kebudayaan	UPTD Museum Adityawarman

Dalam rangka mewujudkan perencanaan strategis Biro Organisasi yang salah satu sasaran strategisnya adalah Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik dipandang perlu juga untuk melakukan pembinaan survey kepuasan masyarakat sebagai salah satu langkah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat sehingga dari hasil survey kepuasan masyarakat tersebut akan dapat diketahui kekurangan yang ada dan perlu untuk disempurnakan, karena hasil survey kepuasan masyarakat akan dapat menentukan atau menimbulkan terciptanya suatu inovasi pelayanan publik. Adapun unsur-unsur yang menjadi tujuan dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

NO UNSUR PELAYANAN	
1	Prosedur Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan
3	Kejelasan petugas pelayanan
4	Kedisiplinan petugas pelayanan
5	Tanggung jawab petugas pelayanan
6	Kemampuan petugas pelayanan
7	Kecepatan Pelayanan

8	Keadilan mendapatkan pelayanan
9	Kesopanan & Keramahan petugas
10	Kewajaran Biaya Pelayanan
11	Kepastian Biaya pelayanan
12	Kepastian Jadwal pelayanan
13	Kenyamanan lingkungan
14	Keamanan pelayanan

Untuk lebih jelasnya hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.3.7.

Tabel 3.3.7
DAFTAR NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG
MELAKSANAKAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2018

NO	NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	SKOR
1	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	91,06
2	RSUD Muhammad Natsir Solok	89,50
3	RSUD Pariaman	92,02
4	RSJ. Prof.Dr. HB. Sa'anin Padang	85
5	UPTD. Balai Kesehatan Indra Mata Padang	97,00
6	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumbar	84,65
7	UPTD. Rumah Sakit Hewan, Dinas Peternakan Prov. Sumbar	90.02
8	UPTD. Balai Pengembangan Teknik dan Sumber Daya Buah Sakato Payakumbuh	89,39
9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumbar	81,26
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar	75,28
11	UPTD. Balai Latihan Kerja Payakumbuh , Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	84,05
12	UPTD. Balai Latihan Kerja Padang Panjang. , Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	75,31
13	UPTD. Pengawasan Wilayah I Padang, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	78,07

14	UPTD. Pengawasan Wilayah II Sijunjung	78,84
15	UPTD. Pengawasan Wilayah III Payakumbuh	73,58
16	UPTD. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	79,05
17	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	76,85
18	UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Lubuk Sikaping	79,6
19	UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang Panjang	77,6
20	UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Dharmasraya	77,3
	Rata- rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,77

Dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh 20 (Sembilan Belas) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2018 dengan rata-rata nilai 82,77 dengan kategori mutu pelayanan **Baik**.

Perbandingan realisasi target kinerja dan capaian indikator kinerja Rata-rata hasil penilaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2017 dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.3.8.

Tabel 3.3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat

No	Indikator	Target dan Realisasi				Capaian	
		2017		2018		2017	2018
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Rata- rata IKM	B (75)	B (80,58)	A (81)	A (83,02)	107,44%	102,49%

Dari upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang dicapai dengan pelaksanaan peningkatan inovasi pelayanan publik yang ditunjang dengan pelaksanaan pembinaan survey kepuasan masyarakat akan dapat memenuhi target capaian sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya inovasi pelayanan publik sebesar 100% termasuk berhasil dengan mutu penyelenggaraan pelayanan berdasarkan survey kepuasan masyarakat termasuk kategori **Baik**, dan keberhasilan tersebut disebabkan karena adanya :

1. Adanya penyelenggaraan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik setiap tahun akan dapat diketahuinya jumlah inovasi yang diciptakan oleh unit kerja penyelenggara pelayanan publik.
2. Adanya evaluasi Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas pelayanan publik dan tingkat kepatuhan terhadap Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang untuk tingkat Nasional Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk 5 (lima) besar tingkat Nasional, hal ini mendorong setiap OPD sebagai penyelenggara pelayanan publik meningkatkan kualitas pelayanannya.
3. Adanya peraturan sebagai payung hukum dalam penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dan Inovasi Pelayanan Publik

Tahun 2018 anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang terlaksananya sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya inovasi pelayanan publik anggarannya tersedia pada 2 (dua) program yaitu program peningkatan kualitas pelayanan publik dan Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebanyak 6 (enam) kegiatan dan jumlah anggarannya sebesar **Rp. 593.078.140,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 552.377.001,-** atau dengan persentase sebesar **93,14 %**.



SASARAN STRATEGIS 4 **Meningkatkan Tata Kelola Organisasi**

Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi serta adanya komunikasi antar kelembagaan, disamping itu pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan untuk adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut dengan memperhatikan unsur-unsur penunjang dalam terbentuk suatu organisasi terutama bagi organisasi perangkat daerah. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Spesialisasi kegiatan.
2. Koordinasi kegiatan.
3. Standarisasi kegiatan.
4. Sentralisasi dan Desentralisasi pembuatan keputusan
5. Ukuran satuan kerja.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi pondasi penting didalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan utuh.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuan melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara professional dan handal serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi didalam meningkatkan manajemen pemerintahan.

Sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Biro Organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya telah melakukan suatu perencanaan yang terangkum dalam suatu perencanaan strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat suatu sasaran strategis yang berkaitan kepada tata kelola organisasi dengan indikator :

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas

Nilai evaluasi akuntabilitas Biro Organisasi berdasarkan kepada evaluasi laporan kinerja tahun 2018 terhadap pemakaian anggaran tahun 2017, Biro Organisasi memperoleh nilai 70,28 dengan kategori penilaian **BB**.

2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan, yang pada tahun 2018 sesuai dengan perencanaan pada Biro Organisasi terdapat 10 (Sepuluh) program dengan 45 (empat puluh lima) kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2018 berjumlah **Rp. 5.013.398.173,-** yang terealisasi sebesar Rp.

4.644.082.076,- atau dengan besaran persentase realisasi keuangan sebesar **92,63%** dan realisasi fisik 100%.

Untuk lebih jelasnya tingkat capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis 4 dapat dilihat pada Tabel 3.3.9

Tabel 3.3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
2	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan.			
	- Realisasi fisik (%)	100	100	100
	- Realisasi Keuangan (%)	95	92,63	97,51
		Capaian Rata – Rata		99,17 %

Dari tabel 3.3.9 dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 4, yaitu dengan capaian rata-rata sebesar 99,17%, dan untuk lebih jelasnya dapat disampaikan perbandingan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Biro Organisasi dan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3.10

Tabel 3.3.10
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 4 Tahun 2017 Dengan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target/Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja (%)	
		2017		2018		2017	2018
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	200	100
2	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan.						
	- Realisasi fisik (%)	100	100	100	100	100	100
	- Realisasi Keuangan (%)	95	90,77	95	92,63	95,55	97,51

--	--	--	--	--	--	--	--

3.4 Realisasi Anggaran

Dalam upaya mewujudkan capaian target kinerja indikator kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan Biro Organisasi dalam Perubahan Renstra 2016-2021, dimana tahun 2018 mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Organisasi sebesar Rp. **5.013.398.173,-** dan untuk realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4.1
Realisasi Anggaran 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 696,063,909	Rp. 629,891,637	90.49%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 13,420,959	Rp. 8,637,201	64.36%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 3,876,000	Rp. 668,939	17.26%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 36,320,520	Rp. 27,931,520	76.90%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 64,167,750	Rp. 54,414,750	84.80%
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rp. 565,734,680	Rp. 529,139,227	93.53%
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 12,544,000	Rp. 9,100,000	72.54%
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 747,393,249	Rp. 650,130,767	86.99%
1	Pengadaan Meubeler	Rp. 119,780,000	Rp. 109,560,000	91.47%
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Rp. 95,088,337	Rp. 91,600,000	96.33%
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 109,936,412	Rp. 60,986,767	55.47%
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Rp. 2,350,000	Rp. 2,350,000	100.00%
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Rp. 22,400,000	Rp. 17,705,000	79.04%

6	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	Rp. 20,452,500	Rp. 20,079,000	98.17%
7	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Rp. 325,000,000	Rp. 303,750,000	93.46%
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 52,386,000	Rp. 44,100,000	84.18%
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp. 59,759,699	Rp. 39,790,900	66.58%
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 59,759,699	Rp. 39,790,900	66.58%
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 204,033,050	Rp. 177,729,596	87.11%
1	Penatausahaan Keuangan SKPD	Rp. 146,951,300	Rp. 145,989,596	99.35%
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 57,081,750	Rp. 31,740,000	55.60%
V	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp. 521,052,825	Rp. 490,648,300	94.16%
1	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 238,011,095	Rp. 230,628,700	96.90%
2	Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov. Sumbar	Rp. 39,802,200	Rp. 36,802,900	92.46%
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov Sumatera Barat Tahun 2018	Rp. 81,476,830	Rp. 72,775,600	89.32%
4	Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar	Rp. 161,762,700	Rp. 150,441,100	93.00%
VI	MANAJEMEN PERUBAHAN	Rp. 184,500,800	Rp. 181,574,600	98.41%
1	Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 184,500,800	Rp. 181,574,600	98.41%
VII	PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR	Rp. 336,957,418	Rp. 320,558,149	95.13%

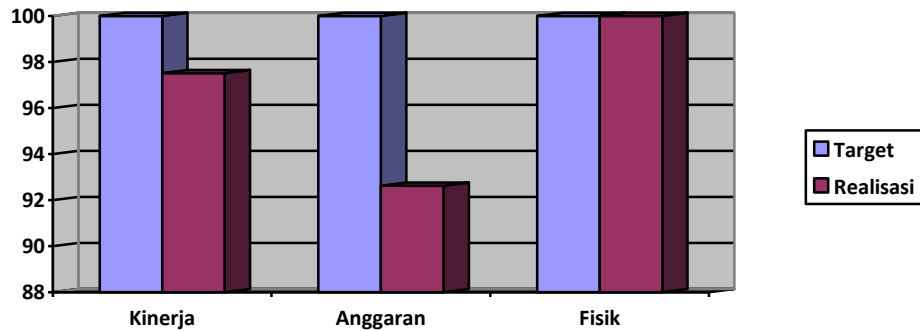
1	Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar	Rp. 71,126,270	Rp. 69,189,900	97.28%
2	Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian	Rp. 45,576,360	Rp. 42,426,950	93.09%
3	Monitoring Pengembangan Karier PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 24,960,800	Rp. 24,900,700	99.76%
4	Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 92,143,400	Rp. 83,716,243	90.85%
5	Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja	Rp. 35,900,400	Rp. 35,425,606	98.68%
6	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai ASN Setda Prov. Sumbar *****	Rp. 0	Rp. 0	0.00%
7	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp. 67,250,188	Rp. 64,898,750	96.50%
VIII	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Rp. 384,879,728	Rp. 349,989,383	90.93%
1	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 39,112,335	Rp. 33,066,550	84.54%
2	Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Rp. 85,298,558	Rp. 76,514,070	89.70%
3	Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rp. 80,462,585	Rp. 70,278,243	87.34%
4	Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Rp. 67,437,850	Rp. 66,634,620	98.81%
5	Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 112,568,400	Rp. 103,495,900	91.94%
IX	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Rp. 1,446,340,048	Rp. 1,390,655,303	96.15%
1	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 343,000,000	Rp. 337,348,258	98.35%

2	Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 125,000,000	Rp. 120,824,292	96.66%
3	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp. 138,163,600	Rp. 135,864,450	98.34%
4	Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se-Sumatera Barat	Rp. 104,348,420	Rp. 94,547,050	90.61%
5	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp. 108,475,500	Rp. 106,120,850	97.83%
6	Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Rp. 116,219,039	Rp. 106,829,500	91.92%
7	Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Rp. 511,133,489	Rp. 489,120,903	95.69%
X	PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 432,417,447	Rp. 413,113,441	95.54%
1	Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 42,488,250	Rp. 40,121,338	94.43%
2	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Rp. 69,053,335	Rp. 62,068,035	89.88%
3	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 112,677,450	Rp. 108,536,450	96.32%
4	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik	Rp. 208,198,412	Rp. 202,387,618	97.21%
	Total	Rp. 5,013,398,173	Rp. 4,644,082,076	92.63%

Dari tabel 3.4.1 dapat dilihat, bahwa total anggaran Biro Organisasi tahun 2018 sebesar Rp. **5,013,398,173,-** direalisasikan sebesar Rp. **4,644,082,076,-** dengan persentase **92.63**, artinya terdapat sisa anggaran sebesar **7,37%**. Adanya sisa anggaran ini disebabkan karena efisiensi penggunaan anggaran dan tingkat capaian indikator kinerja

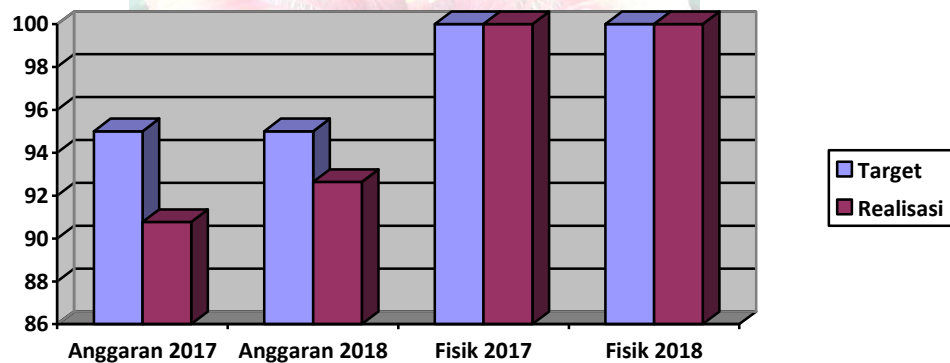
dibandingkan dengan efisiensi penggunaan pagu anggaran dan realisasi fisik selanjutnya dapat dilihat pada grafik 1 (satu) dibawah ini:

Grafik 1



Berdasarkan kepada tingkat realisasi anggaran 2017 dan realisasi fisik 2017 dibandingkan dengan tahun 2018 dapat dilihat pada grafik 2 (dua) dibawah ini :

Grafik 2



BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas secara umum dapat disimpulkan pencapaian kinerja organisasi Biro Organisasi tahun 2018 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan kepada Renstra Perubahan Biro Organisasi 2016-2021, namun untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang diukur berdasarkan capaian rata-rata 6 (enam) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 91,25%.
2. Untuk peningkatan kinerja organisasi tahun-tahun yang akan datang, Biro Organisasi perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Untuk mewujudkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang menyeluruh berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
 - b. Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan standar operasional prosedur sebagai suatu sistem ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan reviuw SOP OPD berdasarkan kepada penataan kelembagaan, dan disamping itu perlu juga dilakukan peningkatan kemampuan aparatur Organisasi Perangkat Daerah dalam penerapan standar operasional prosedur untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - c. Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan public yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
 - d. Untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan permasalahannya, untuk kedepannya setiap Unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi diwajibkan untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara mandiri dan melaporkannya kepada pembina pelayanan publik melalui penanggungjawab pelayanan publik pada

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta melakukan sosialisasi penyampaian dan pengelolaan pengaduan pelayanan public berbasis elektronik (LAPOR-SP4N)

- e. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu diupayakan :
- 1) Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai pejabat eselon IV di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dimulai pada waktu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- f. Untuk terlaksananya reformasi birokrasi dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara terencana, melembaga, dan konsisten serta berkelanjutan perlu diterapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan RPJMD dan ditindaklanjuti dengan program aksi pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan program aksi yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan reformasi birokrasi dan untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam penerapan reformasi birokrasi.

